

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Amiruddin et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Nur Kholis, *Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*: Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Andi W. Erwin Febrian, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No.12 Tahun 1995*: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016
- Patricia Debora Yunita, *Analisis Persyaratan Khusus Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*: Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Mohamad Hidayat Mohtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Beni Kurnia Illahi, *Penataan Ulang Pengaturan Pencegahan Praktik Korupsi Kampanye dalam Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Negara*, Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 2019.
- Atmasasmita, R. Achamd S. Soemadipraja dan Romli. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1979.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta: Kemenkuham, 2017.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Farida Indrati Suprpto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Softmedia, 2012.
- <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada 22 Juni 2023.
- Irwan Pandjaitan, Petrus. *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2008.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

- Mahfud MD, Mohammad. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singka*, Jakarta:Rajawali Press, 2000.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marwan Eryansyah, Andi. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Mohammad, et.al, “Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor dalam Kondisi Penyebaran Covid-19 Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 7, No. 2. Desember, 2021.
- Muwahid, “Penerapan hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 18. No. 2, Desember, 2015.
- Pane, Erina. *Legal Drafting* , Harakindo Publishing: Bandar Lampung, 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Ras, Redaksi. *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Ruba’i, Masruchin et.al, *Hukum Pidana* , Jakarta: Bayumedia Publishing, 2014.
- Saefudin, Wahyu, *Psikologi Pemasyarakatan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Suhartini, Andewi. “Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan dan Implikasi”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 10. No. 01, Januari-2007.
- Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Utami, Widodo dan Wiwik. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.